

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOREJO KECAMATAN
UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

NUR AINI MAYASIANA*

NUR HOFIA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

*Email: mayasiana30@gmail.com

ABSTRACT

The position of the leader in an organization has a very important role. The position as village head is needed to assist local governments in dealing with problems that exist in a village, solving various problems that occur in village communities, and coordinating all village community interests in every decision making. Developing the potential of the village certainly requires a competent strategy and ability by a leader so that the village he leads will be better in the future. This study aims to describe how the role of women's village leadership in empowering the people of Sidorejo village, Umbulsari district, Jember district. This type of research is a qualitative descriptive research. The purpose of this study was to describe the leadership role of female village heads in community empowerment. The focus of the research is how the role of women's village heads in community empowerment is. The results of this study indicate that there is an influence of job characteristics with women's leadership. In general, the leadership used by the female village head of Sidorejo village is democratic leadership. The village head carries out his role well, as it can be concluded that the role of the village head in community empowerment in Sidorejo village is 2, namely physical development and non-physical development. The role of the Sidorejo village head is seen from various indicators as follows: the role of the village head in community development, the role of the village head in coordinating development in a participatory manner. The village head plays an active role in every citizen activity. Residents are heavily involved in village development. Increasing community involvement not only as objects and actors in community empowerment, but also involving the community in village development.

Keywords: *Women's Leadership, Village Head, Empowerment*

I. PENDAHULUAN

Suatu organisasi, entah itu formal maupun non formal pasti mempunyai seorang pemimpin. Pemimpin memiliki posisi yang sangat penting dalam menggerakkan organisasinya untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemampuan yang mumpuni sebagai seorang pemimpin sangat dibutuhkan agar tujuan organisasi tidak hanya berjalan efektif dan efisien, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi.

Pemimpin merupakan sosok penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab berkaitan dengan kedudukannya dalam seluruh proses kegiatan dan sebagai pemecah masalah. Begitu pula dalam organisasi pemerintahan seperti desa, dimana desa sebagai pemerintahan terkecil juga membutuhkan peran pemimpin yang disebut dengan kepala desa/lurah.

Kepemimpinan seorang kepala desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang terdapat di suatu desa, memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam

masyarakat desa, serta mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan.

Pemimpin desa bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur desanya saja. Tetapi juga sebagai pemimpin untuk seluruh warga desa. Peranan kepala desa ini menjadi sangat penting jika mengingat upaya-upaya pemerintah selama ini untuk pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia menjadi lebih mandiri.

Konsep kepemimpinan desa jika dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, maka pemimpin desa akan dituntut untuk untuk menjadi pemimpin yang siap menjadi perantara rakyat, sehingga harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bijak, sehingga diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyatnya. Kedua kemampuan ini dibutuhkan seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemimpinan adalah kunci dari berhasil tidaknya pembangunan desa,

khususnya terkait pemberdayaan masyarakat di daerahnya.

Sehingga dibutuhkan pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa, yang dapat menjalin komunikasi dengan baik kepada atasannya, anggotanya (perangkat), maupun warganya. Sebab hal ini akan berdampak pada baik tidaknya pelaksanaan kegiatan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat, baik dalam pelaksanaan dan pengkoordinasian.

Kepemimpinan saat ini sudah tidak ada isu-isu terkait gender. Kebebasan perempuan dalam mengaktualisasikan diri sudah sangat terbuka. Sebagaimana yang terdapat di desa Sidorejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember, dipimpin oleh kepala desa perempuan.

Peran sebagai seorang kepala desa baik perempuan atau laki-laki tetap harus dijalankan, yaitu dalam memberdayakan masyarakat desa. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menolong masyarakat dalam menciptakan “masyarakat mandiri dan berdaya” sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan lebih

berdaya terutama dalam meningkatkan perekonomian keluarga, yang akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Di setiap wilayah pasti memiliki potensi masing-masing, begitu potensi-potensi di desa Sidorejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi-potensi yang dimiliki desa Sidorejo kecamatan Umbulsari baik dari sumber daya alam maupun sumberdaya manusia cukup besar dan bernilai, sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar.

Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang diperlukan adalah yang melibatkan masyarakatnya, terutama di desa Sidorejo yang juga memiliki potensi sumberdaya manusia yang baik. Sehingga dituntut agar masyarakat desa Sidorejo lebih terampil dan inovatif untuk dapat memanfaatkan, memperbarui, serta

mengembangkan potensi alam yang ada di desa Sidorejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas,

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peranan

Definisi peranan maknanya berkaitan dengan aspek dinamis dalam status atau kedudukan. Apabila seseorang telah mendapatkan peran maka ia akan mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang diamanatkan, dan artinya ia diharuskan untuk menjalankan peranannya dengan baik.

Unsur hak juga kewajiban tidak bisa dipisahkan, tetapi kedua hal ini juga akan bertentangan satu sama lain. Setiap individu memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan dalam hidupnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa “peranan” individu berarti dapat menentukan apa yang dapat dilakukannya di lingkungannya, dan bagaimana masyarakat memberi perlakuan kepadanya.

peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana peran kepemimpinan perempuan di wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses sebagaimana menurut Soerjono Soekanto (2002:268-269) dalam Mewengkang (2017) bahwa unsur-unsur peranan meliputi:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan;
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban;
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan;
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Akan tetapi, peranan pada dasarnya dikelilingi oleh aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga jika seseorang memiliki “peranan” atau

menduduki suatu posisi dalam masyarakat, maka ia juga terikat oleh norma-norma yang berlaku dalam menjalankan peranannya tersebut. Dalam Soerjono Soekanto (2002:246) dalam Kurniawan (2016) peranan mencakup dari tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan;
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Konsep Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain di

sekitarnya khususnya bagian dari kelompoknya. Seorang yang pemimpin yang layaknya seperti nahkoda yang membawa perahu. Mampu membawa perahu ke arah tujuan dengan mengarahkan, mendorong dan memanfaatkan, dengan gaya kepemimpinannya sehingga disekitarnya dapat menggerakkan anggotanya menuju visi dan misi yang telah ditentukan.

Beberapa konsep kepemimpinan menurut para ahli sebagaimana menurut Stoner (1996:161) dalam Parjadinata (2020), mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.

Kemudian tipe kepemimpinan menurut Heidjarachman dan Husnan (2002:224) dalam Hartanto (2014) bahwa tipe kepemimpinan adalah pola dari perilaku untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan tujuan semua orang agar dapat tercapai tujuan tertentu sedangkan gagasan lain menyimpulkan bahwa tipe kepemimpinan merupakan pola perilaku (perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan) dari seorang

pemimpin yang dirasakan oleh orang lain *The Power of Position*, secara otoritas.

Kemudian menurut Cleary (2002:5) dalam Jenita (2016), berpendapat lain tentang kepemimpinan adalah sebuah persoalan kecerdasan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian dan ketegasan.

2.3 Konsep Perempuan

Asal usul kata perempuan adalah kata “empu” dan “puan”. “empu” yang bermakna tuan, tuan dalam pemaknaan artinya mahir atau memiliki kuasa, dan dihargai. “empu” atau tuan, sapaan bagi laki-laki. Kemudian dari kata “puan” yang artinya saapan untuk menghormati perempuan (Haikal 2012:39 dalam Mewengkang, 2017).

Ciptaan Tuhan terhadap makhlukNya yaitu perempuan, sangatlah istimewa. Memiliki keunikan tersendiri baik dari penciptaannya, rasionalitasnya, kodrat, dan peran-perannya dalam kehidupan. Keistimewaan perempuan sebagai makhluk yang dianugrahi sifat lemah lembut dan

penuh kasih sayang (keibuan), memiliki kepekaan (perasaan yang halus) secara umum menggambarkan keindahan untuk menggambarkan sosok perempuan.

Perempuan identik dengan karakter yang kalem (lembut), perasaan yang sensitif terhadap suatu hal, perempuan lebih mudah menangis bahkan pingsan jika menghadapi suatu hal yang menyentuh kepekaannya. Itu adalah beberapa gambaran secara fisiologis tentang sosok perempuan, yang kemudian diperkuat dengan struktur kebudayaan yang ada di lingkungannya, seperti adat istiadat daerah tempat tinggal perempuan, dan secara khusus juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan faktor pendidikan perempuan.

2.4 Kepemimpinan Kepala Desa

Merujuk dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taliziduhu Ndraha (2003:226) dalam Wilar (2021) mengemukakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang hubungannya satu dengan yang lain, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Winarni (1998:75) dalam Mahmud (2019) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah penciptaan situasi atau iklim yang dapat menjadikan masyarakatnya berkembang

(*enabling*). Hal ini didasari pada anggapan bahwa tidak ada masyarakat tanpa kemampuan, atau masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya.

Seseorang, bahkan sekelompok masyarakat tentu mempunyai kemampuan dalam suatu hal, akan tetapi terkadang seseorang tersebut atau mereka tidak menyadarinya, atau pada suatu kasus kemampuan tersebut belum diketahui secara nyata (eksplisit). Itu sebabnya kemampuan atau suatu daya harus ditelusuri atau digali, sehingga jika berpotensi dikembangkan akan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, sehingga memerlukan dorongan, motivasi, dan kesadaran untuk menggali potensi yang ada, dan berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan mempunyai arti membangkitkan suatu daya (sumber daya), baik membangkitkan kesempatan, pengetahuan juga keterampilan. Objek dalam pemberdayaan adalah masyarakat, dimana masyarakat adalah

sekelompok manusia yang memiliki daya, sehingga perlu meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka, sebagaimana menurut pandangan Suparjan dan Hempri (2003:43) dalam Miradj & Sumarno (2014).

Konsep awal yang terdapat di dalam makna pemberdayaan artinya bagaimana memberi kesempatan secara luas kepada masyarakat agar dapat menentukan sendiri arah kehidupan didalam komunitasnya.

Konsep pemberdayaan artinya memberikan dorongan kepada suatu kelompok masyarakat dalam mengambil keputusan sendiri atau berlaku otomom. Dengan menerapkan sistem demokrasi dan partisipasi yang berfokus pada lokalitas, maka akan mendasari landasan bagi peupayaan

pengelolaan dan peningkatan potensi yang dimiliki. Kemudian pada akhirnya pemberdayaan masyarakat ini juga memfokuskan kepada penguatan individu (manusia) sebagai bagian dari kelompok masyarakat beserta pranata-pranatanya.

Dalam pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan utama dengan menempatkan masyarakat bukan hanya sekedar menjadi objek akan tetapi juga sebagai subjek. Arti yang terkandung dalam konteks pemberdayaan sebenarnya adalah keterlibatan (partisipasi) masyarakat yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai fenomena kepemimpinan wanita dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sebab dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam

fenomena yang menjadi objek penelitian. Sebagaimana menurut Sugiyono (2014:15), bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti pada

kondisi objektif secara alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

1. Fokus Penelitian

Fokus peranan kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa Sidorejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember. Peranan kepemimpinan yang diamati adalah meliputi:

- a. Peran keterlibatan pemimpin Kepala Desa perempuan dalam perencanaan program-program desa.
- b. Peran keterlibatan pemimpin Kepala Desa perempuan dalam kegiatan warganya. Peran keterlibatan pemimpin Kepala Desa perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan. Sebagaimana menurut Herdiansyah (2012:56) dalam Maulana & Sumarji

(2020) menjelaskan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data. Kemudian dari defenisi tersebut apabila dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka lokasi penelitian yang ditentukan secara sengaja (*purvosive*) dan mendasarkan pada masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah Desa Sidorejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengambilan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, sebagaimana menurut Arikunto (2010), diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

4. Jenis Data

Kualitatif deskriptif adalah jenis data utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari data primer dan data sekunder, menurut Subagyo (2006:87-88) dalam Runiani (2013). Data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, kemudian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

5. Sumber Data

Sumber data menurut Iman Suprayoga dalam Darwis & Rantika (2018), sumber data dalam penelitian deskriptif kualitatif terbagi atas beberapa yaitu narasumber (informan), peristiwa (aktivitas), dokumen atau arsip. Sumber data yang dimaksud, diantaranya: (1) narasumber, (2) peristiwa, (3) lokasi, dan (4) arsip.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini

merupakan analisis data model interaktif yang menggunakan tiga komponen yaitu pemilihan data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Gunawan (2013), bahwa proses analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data:

- a. Data (dari hasil wawancara).
- b. Pemilihan data atau reduksi data (pemaknaan, konfirmasi data, dan penarikan kesimpulan).

7. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat

Dalam penelitian ditemukan bahwa peran sebagai kepala desa dalam pembinaan masyarakat, yaitu dengan ditemukannya kegiatan-kegiatan pengembangan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seorang kepala desa, yaitu dengan menghidupkan kembali budaya masyarakat asli Indonesia, yaitu gotong royong. Di desa Sidorejo terbiasa melakukan kegiatan yang menganut nilai-nilai kearifan sosial seperti bermusyawarah dan bergotong royong.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini tidak lain untuk selalu menjaga ketentraman masyarakat, mengubah sikap juga perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga kepala desa harus dapat memanfaatkan kesiapan masyarakat dan keinginan masyarakatnya agar pemberdayaan tercapai dengan baik.

Kepala desa Sidorejo konsisten memimpin masyarakat dengan membudayakan kegiatan gotong royong dan musyawarah, tidak lain karena di Sidorejo terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda-beda agama. Sehingga toleransi beragama sangat tinggi

dijunjung masyarakat desa Sidorejo sejak lama. Sehingga dengan terus menerus menjaga nilai-nilai kearifan masyarakat ini baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pemberdayaan masyarakat, tentu segala tujuan yang berkaitan dengan pengembangan desa akan tercapai dan terlaksana dengan baik.

Desa Sidorejo adalah desa swadaya yang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Dalam kegiatan sehari-hari yang menyangkut dengan profesi pun masyarakat desa Sidorejo sering mengadakan musyawarah bersama perangkat desa, misalkan saat ada penyuluhan dari dinas-dinas atau lembaga eksternal, masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pengembangan infrastruktur desa. Desa Sidorejo terbiasa membangun jalan desa bersama-sama, sebagai kegiatan kerja bakti masyarakat desa. Tentu hal-hal seperti ini tidak lepas dari peranan kepala desa yang secara aktif turut serta dalam setiap kegiatan pembinaan masyarakat.

Membangun desa sama halnya dengan membangun negeri. Di Indonesia terdapat sekitar 74 ribu desa, maka dari itu perhatian pemerintah juga harus konsen terhadap desa yang notabene segala yang dibutuhkan perkotaan pun berasal dari desa. Sehingga dalam usaha pembangunan desa agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang lebih baik tentu harus diperhatikan pemerintah. Akan tetapi, bukan hanya peran pemerintah yang dibutuhkan tetapi juga peran diluar pemerintah, seperti swasta, juga peran masyarakat itu sendiri yang selalu terlibat dalam pengembangan desa. Meskipun dalam kenyatannya, andil pemerintah lebih dominan dalam pembangunan desa, seperti perencanaan dan implementasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa.

Peran kepala desa Sidorejo dalam membina masyarakatnya, selain melalui kegiatan-kegiatan formal tetapi juga dengan kegiatan non formal. Kepala desa selalu mengajak masyarakatnya untuk berdiskusi, misalnya dengan

kelompok petani, kelompok peternak, dan para pemuda (karang taruna) melalui dialog komunitas, dan mengajak masyarakat untuk berbicara secara terbuka.

Kegiatan-kegiatan pembinaan terkait peran kepala desa di Sidorejo, lebih mengarah pada penjelasan secara makna, maksud dan tujuan, juga manfaat dari pemberdayaan masyarakat, juga pada praktek nyata kehidupan sehari-hari di desa Sidorejo, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam membangun desa melalui suara saat bermusyawarah, dan kerja bakti (gotong royong) masyarakat yang sering diadakan. Sehingga peran kepala desa dalam membangkitkan semangat jiwa warga desanya untuk membangun desa cukup terlihat. Tentu hal ini tidak lain karena kepala desa membaur dengan masyarakatnya, membuka diskusi dengan warganya, dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan, tidak membuat pembatas antara pemimpin dan warganya yang akan membuat jarak diantara pemimpin dan rakyat.

4.2 Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan

Dalam penelitian ditemukan bahwa peran kepala desa Sidorejo konsisten dalam mengkoordinasikan pembangunan desa. Terlihat dengan ketentraman warganya, sebab di desa Sidorejo mayoritas penduduknya non muslim, dengan seorang pemimpin yang muslim, akan tetapi pemimpin desa tidak membeda-bedakan agama, serta didukung oleh masyarakatnya yang guyup. Hal lain juga terlihat dengan adanya pelayanan dari perangkat desa yang responsif kepada masyarakatnya tanpa melihat apa agamanya.

Selain itu, dalam membangun desa dibutuhkan kemampuan kepala desa dalam berkoordinasi dengan aparatur desa dan warganya. Hal ini tidak lain agar selaras dengan tujuan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pengaruh masyarakat desa sangat besar dalam membangun desa, sehingga besar kecilnya partisipasi warga desa terhadap pemerintah dan desanya merupakan faktor terpenting dalam jalan pembangunan desa. Keterlibatan

masyarakat bukan hanya wacana atau sebuah perencanaan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam setiap program-program desa, sehingga hal ini akan lebih mudah dalam perwujudan pembangunan desa, juga tidak menimbulkan penilaian buruk atau negatif terhadap pemerintah desa. Sebab pada dasarnya tugas kepala desa dan perangkat desa sebagai pelayan warga desa, bukan dilayani masyarakat desa.

Dalam penerapannya di desa Sidorejo, pemerintah desa melayani masyarakat dengan cukup baik, terlihat dengan responsifnya aparatur desa kepada setiap permasalahan warganya, misalkan saat ada keluhan dari komunitas peternak terhadap pakan ternak yang kurang memadai, pemerintah desa Sidorejo menyediakan ruang untuk pihak eksternal seperti dari Perguruan Tinggi mengadakan penyuluhan terhadap warga desa, dan memberikan alat bantu bagi komunitas ternak di desa Sidorejo. Dari sini terlihat bahwa di desa Sidorejo telah membangun partisipasi masyarakat dengan cara

memberikan kebebasan masyarakat dalam bersuara (mengutarakan pendapat), bermusyawarah bersama, dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut sehingga perencanaan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

Peran kepala desa Sidorejo dalam berkegiatan selalu melibatkan perangkat desa. Tidak hanya berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa Sidorejo juga selalu berkoordinasi dengan atasannya yaitu camat (Jenggawah) juga pemerintah daerah (Kabupaten Jember). Hal ini untuk menyinergikan hubungan yang berkaitan dengan pemerintah, agar tujuan dari pembangunan desa dapat tercapai, sebab pada dasarnya dalam membangun desa merupakan tanggungjawab pemerintah dan warganya. Warga desa sebagai sasaran pembangunan, sekaligus pelaku pembangunan itu sendiri. Keterlibatan warga desa di setiap pembangunan desa, tentu menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Kepala desa Sidorejo membangun desa secara partisipatif, yaitu melibatkan warga dalam setiap

musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini terlihat dengan adanya kelompok-kelompok peternak, petani, dan karang taruna di desa Sidorejo yang bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang baik berkaitan dengan pembangunan desa. Hal ini tentu ada koordinasi atau komunikasi antara kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh desa, dan kelompok-kelompok masyarakat yang terjalin baik di desa Sidorejo.

Desa Sidorejo sebagai desa agraris yang sebagian wilayahnya adalah persawahan dan perkebunan, memungkinkan potensi di bidang sumber daya alamnya akan tergali dengan baik jika seluruh *stakeholder* desa berperan sesuai fungsinya. Ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok peternak dan petani, juga karang taruna yang saling bersinergi, serta dukungan pemerintah desa, tentu pembangunan desa akan tercapai dengan baik. Sehingga dapat dikatakan di desa Sidorejo tidak ada penilaian negatif terhadap pemerintahnya, sebab aparat desa dapat menyinergikan kelompok-kelompok masyarakat di desanya.

Di desa Sidorejo pembangunan partisipasi dijadikan upaya dalam mengembangkan potensi desa, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh desa Sidorejo seperti potensi kelompok-kelompok masyarakatnya, potensi lembaga desanya (BUMDes), sumber daya manusianya yang memiliki toleransi tinggi, juga sumber daya alamnya yang melimpah, hal ini tentu dibutuhkan pemimpin yang tepat yang tidak hanya dapat menjaga dengan baik segala potensi tersebut, tetapi juga mengembangkannya untuk kemakmuran warganya.

Perwujudan pembangunan desa dapat disimpulkan terlaksana dengan baik. Konsep pembangunan secara partisipatif di desa Sidorejo tidak hanya sebuah wacana, tetapi memang mampu diimplementasikan secara baik, melalui peran kepala desanya, peran perangkat desanya, peran tokoh-tokoh masyarakatnya, serta warga desanya. Di desa Sidorejo kelompok masyarakat dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhannya yang tentu berguna bagi masyarakat secara luas. Hal ini tentu dapat membantu kinerja

pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan warganya. Kemudian partisipasi masyarakat dalam menyampaikan hak berpendapat selain dapat langsung disalurkan kepada pemerintah desa, juga dapat ditampung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berkait.

Perangkat desa dan kepala desa Sidorejo terbiasa berdialog dengan warga baik dalam kegiatan formal maupun non formal. Tentu aktivitas seperti ini dapat merangsang warganya untuk terus aktif berpendapat berkaitan dengan kemajuan desa, aspirasi warga dalam kegiatan seperti ini dapat menjadi awal perbaikan permasalahan yang ada di desanya. Sebab pada dasarnya kepala desa tidak hanya mempunyai peran pemimpin, memerintah, membimbing, dan mengarahkan, tetapi juga harus menjadi fasilitator warga dalam mencapai pembangunan desa.

Kepala desa harus memiliki sikap yang tegas yang tidak membeda-bedakan warganya. Terutama di desa Sidorejo yang memiliki agama yang berbeda-beda, sehingga akan sarat dengan

pergesekan. Dengan demikian kepala desa harus dapat menengahi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakatnya, hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antar warga sehingga akan menimbulkan konflik-konflik yang menghambat pembangunan desa. Dengan adanya dukungan gerakan reformasi yang dapat mengubah kekuasaan sentralisasi menjadi desentralisasi, maka pemerintah desa diberikan kebebasan dalam mengembangkan desanya seoptimal mungkin, hal ini tentu dengan dukungan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Pemerintah pusat telah melakukan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal ini sebagai dasar yuridis dalam mengganti fokus ketatanegaraan menjadi desentralisasi (pemberian kekuasaan dari pusat kepada daerah), hal ini menjadi dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Pemerintahan Kelurahan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Pemerintahan Desa. Dimana

peraturan tersebut merupakan aturan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah lokal dalam menekankan prinsip demokrasi, dan menyertakan masyarakat dalam meratakan keadilan, dengan memperhatikan potensi juga keragaman budaya, suku, ras, agama yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dalam perencanaan pembangunan desa, tentu tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah desa sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan warga, serta menjadi tonggak strategis untuk membangun desa, sehingga pemerintah desa (perangkat desa) perlu menyadari apa yang menjadi tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), mengembangkan apa yang harus dikembangkan, juga menyelesaikan permasalahan dalam lingkup internal maupun eksternalnya.

Sebagaimana di desa Sidorejo, pembangunan desa berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga sasaran-sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai secara

efektif dan efisien. Adapun sasaran-sasaran yang perlu dicapai dalam pembangunan desa, sebagaimana berikut diantaranya:

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- b. Mengembangkan sumberdaya manusia yang handal.
- c. Mengembangkan sumber daya alam, serta melestarikan lingkungan hidup sehingga dapat dipergunakan secara berkelanjutan demi kepentingan bersama.

Pemerintah desa Sidorejo berusaha menjalankan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) juga dengan mengembangkan sumber manusia yang handal, sehingga perhatian pemerintah desa yaitu peningkatan pendidikan anak-anak di desa tersebut. Perhatian tidak hanya pada ranah pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal, misalnya seperti pengadaan pelatihan-pelatihan.

Upaya kepala desa dalam meningkatkan mutu sumber manusia yang handal ini, kerap dilakukan

dalam setiap pertemuan baik formal maupun non formal, dengan mengingatkan kepada warganya akan pentingnya pendidikan, sehingga warga semangat menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi, apalagi didukung oleh pemerintah dengan menggratiskan biaya pendidikan hingga bangku Sekolah Menengah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan di desa Sidorejo terbagi menjadi 2, diantaranya:

1. Pembangunan secara fisik, yaitu pembangunan desa

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kepemimpinan di desa Sidorejo dengan karakter yang terdapat dalam diri perempuan, yang lebih bersifat keibuan, sehingga dapat disebut kepemimpinan kepala desa perempuan di desa Sidorejo

yang terlihat, pembangunan dalam prasarana fisik (infrastruktur), seperti pembangunan jalan desa atau kampung.

2. Pembangunan non fisik, yaitu pembangunan desa yang meliputi non fisik (tidak terlihat), misalnya seperti pemberian pengetahuan (himbauan-himbauan) kepada warganya, juga pelatihan-pelatihan untuk pengembangan *skill* warganya.

berkarakter demokratis dalam memimpin desa.

Kepala desa menjalankan perannya dengan baik, sebagaimana yang dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidorejo ada dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Peranan kepala desa Sidorejo dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

- a. Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat.
- b. Peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipatif

Kepala desa berperan aktif dalam setiap kegiatan warga. Warga banyak dilibatkan dalam pembangunan desa. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa.

5.2 Saran

1. Meningkatkan peranan kepala desa dalam program pembangunan desa, sebaiknya kepala desa dapat lebih sering terjun ke lapangan agar dapat lebih memahami secara langsung keluhan rakyat.
2. Meningkatkan peranan kepala desa dalam pemberdayaan

masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sidorejo semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih maju lagi.

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
4. Diperlukan penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat secara intensif, pelatihan misalnya bagi peternak guna meningkatkan pengetahuan masalah peternakan yang lebih baik, sehingga lebih dapat meningkatkan potensi desa melalui peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Darwis, M., & Rantika, M. (2018). *Konsep Integrasi Keilmuan*

- dalam Perspektif Pemikiran Imam Suprayogo. *Fitra*, 4(1).
- Hartanto, I. (2014). Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada CV. Timur Jaya. *Agora*, 2(2), 979-983.
- Jenita, J. (2015). Menciptakan Pimpinan Yang Handal Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Daya Saing*, 1(3), 214-230
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang*.
- Mahmud, Y., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Maulana, A., & Sumarji, S. (2020). Kampung Wisata Ekologis (Kwe) Puspa Jagad Sebagai Desa Wisata (Ditinjau dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia). *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 127-140
- Mewengkang, L., Mandey, J., & Ruru, J. M. (2017). Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL ADMINISTRASIPUBLIK*, 2(04 4).
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Parjadinata, L., & Surati, D. P. B. S. (2020). Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Program One Day Service di Kantor Pertanahan Kota Mataram. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*
- Ruriani, E., Nafi, A., Yulianti, L. D., & Subagio, A. (2013). Identifikasi potensi MOCAF (Modified Cassava Flour) sebagai bahan substitusi teknis terigu pada industri kecil dan menengah di Jawa Timur (Potency Identification of MOCAF (Modified Cassava Flour) as technical substitution of wheat flour in small and medium enterprises in East Java). *Jurnal Pangan*, 22(3), 229-240.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Bandung.